



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai alat kendali, penilaian kuantitatif kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan dalam perpektif yang lebih luas, berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.


Secara kualitatif kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dapat dikatakan cukup baik hal ini terlihat dari frekwensi prosentase pada analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sebagaimana yang terbaca dalam uraian Laporan Kinerja ini, serta prosentase penyerapan anggaran yang mencapai angka 99,61, dan penyerapan yang tidak mencapai 100% tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor khususnya Penyediaan Aplikasi SIPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang **kurang maksimal** khususnya **aspek maintenance serta penyelesaian persoalan** yang dihadapi oleh daerah / user.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut merupakan konsekuensi logis dari pada perencanaan strategi yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam upaya pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya factor perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi.

Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tergambar secara tersirat dalam analisis pengukuran kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor regulasi, dana, sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ruteng, 12 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Daerah Kabupaten Manggarai



**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196809032000121004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpijak pada Visi, Misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memperhitungkan berbagai kemampuan terutama kemampuan keuangan, maka pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dari evaluasi penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024, menunjukkan bahwa dari beberapa kebijakan yang ditetapkan, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa sub kegiatan yang serapan anggarannya tidak maksimal bahkan 0% karena berbagai alasan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sudah menampakkan hasil yang nyata serta berdampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Manggarai ke depan secara khusus penyediaan anggaran daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pesta Demokrasi baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai selama Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran 1 Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 99,98% dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 97,95 % dengan kategori “memuaskan” dengan total rata-rata capaian kedua sasaran adalah 99,61 % dengan kategori ‘baik’.

Kami menyadari bahwa ada hambatan-hambatan serta kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuatan Laporan Kinerja ini sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat yang berwenang demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ruteng, 15 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Daerah Kabupaten Manggarai



**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**

Pembina Utama Muda

NIP. 196809032000121004

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

#### 1. Dasar hukum berdirinya Organisasi

Adapun dasar hukum pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Pasal 2 huruf e angka 5 “ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”.

#### 2. Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Manggarai nomor 52 Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

- 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Merumuskan perencanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik

- dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
  - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
  - e. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
  - f. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
  - g. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan

- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan melaksanakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang program anggaran dan mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;uangan;
  - b. Menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
  - c. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - d. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
  - g. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
  - h. Menyusun laporan keuangan; dan
  - i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
  - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
  - d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

### 3.1 Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.2 Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;

- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan
  - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 1.1 Subbidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri;
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 1.2 Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berkaitan dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  3. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

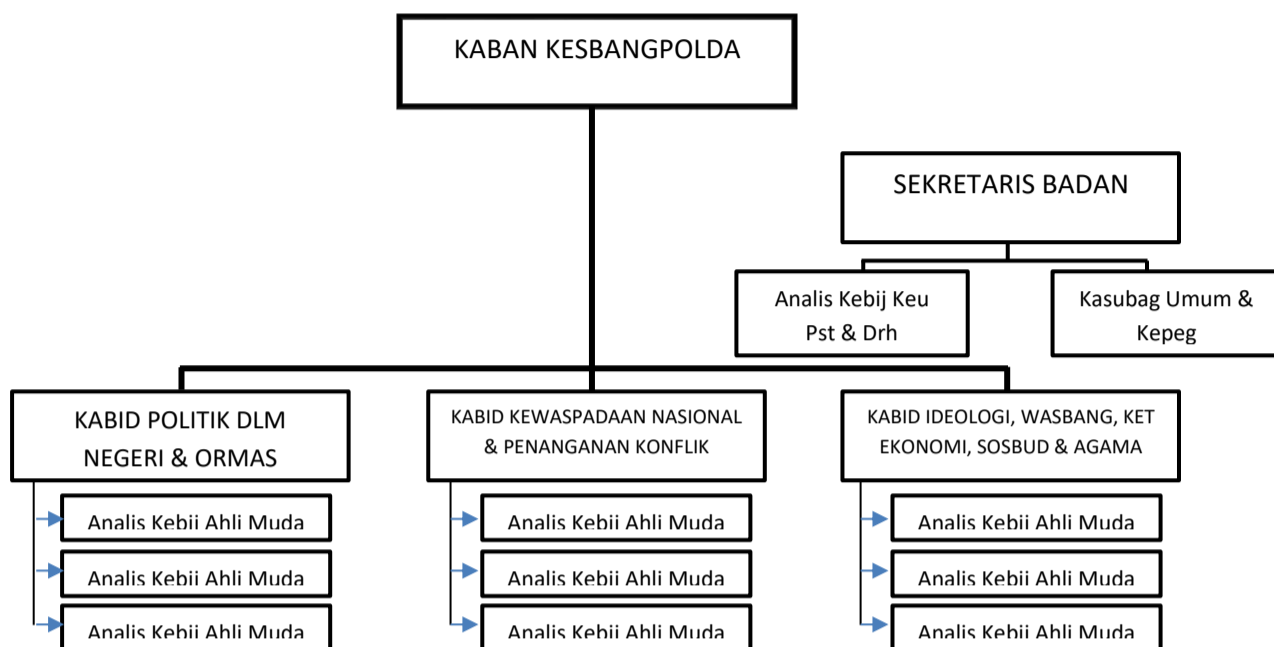
- negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 5.1 Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen menyelenggarakan fungsi:
    - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
    - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan dini dan kerja;
    - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerja; dan
    - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
  - 5.2 Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
    - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penanganan konflik;
    - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan konflik;
    - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penanganan konflik;
    - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan jumlah serta jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai**

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai**



**2. Kondisi SDM Aparatur**

Pada Tahun 2024, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 20 orang. Berikut komposisi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024**

No	Jabatan	Golongan					Non PNS	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Kepala Badan	-	-	-	1	-	1	
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	1	
3	Kepala Bidang	-	-	2	1	-	3	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	4	1	-	5	
5	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	1	
6	Staf/Pelaksana	1	2	5	-	1	8	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	3
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	4	1	-	-	-	5
5	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	-	-	1
6	Staf/Pelaksana	-	2	-	6	-	1	9
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

Sementara itu data pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah seperti yang terdapat dalam Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024**

No	Nama	Pend	Jabatan	Pangkat / Gol.
1	2	3	4	5
1.	Gondolpus B.Nggarang, S.Fil	S-1	Kepala Badan	PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
2.	Yohanes Virgius N.Owa, S.STP	S-1	Sekretaris	PEMBINA TK.1- IV/B
3.	Fransiskus Sengkang, S.Sos	S-1	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	PEMBINA-IV/a
4.	Stefanus Efendi Asmon, SE	S-1	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	PENATA, III/C
5.	Agustinus E.Demo, SSTP	S-1	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	PENATA, III/C
6	Cordinus M.Magul,SH	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PEMBINA-IV/a

7.	Robertus Jekarus,ST	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA TK.I-III/d
8.	Fransiskus Saverinus Ros, SS	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA Tk. I, III/d
9.	Leonardus Manje,SP	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA Tk. I, III/d
10.	Agus Wahyudi, S.AP	S-1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PENATA MUDA TK.I, III/b
11.	Ferdinandus Sensi, A.Md	D-III	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA, III/C
12.	Albertus Magnus Puteraden, S.AB	S-1	PELAKSANA/ASISTEN SIPD	PENATA MUDA, III/a
13.	Ludiana Madul	SLTA	Staff / Pelaksana	PENATA MUDA, III/a
14.	David Milanto P.Gere, S.Tr.IP	S1	Staff / Pelaksana	PENATA MUDA, III/a
15.	Ferdinandus M.Seda	SLTA	Staff / Pelaksana	PENATA MUDA, III/a
16.	Simon Su	SLTA	Staff / Pelaksana	PENATA MUDA, III/a
17.	Wilibrodus Sani Agung	SLTA	Staff / Pelaksana	PENGATUR TK.I -II/d
18.	Vinsensius Padu	SLTA	Staff / Pelaksana	PENGATUR - II/c
19.	Siprianus Garut	SD	Staff / Pelaksana	JURU MUDA TK.I-I/b
20.	Christophorus Hami	SLTA	Staff / Pelaksana	THL

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS**

**A. Rencana Strategi Tahun 2021-2026**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima Tahun, yaitu periode Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

1. Visi dan Penjelasan Makna Visi.

➤ VISI

**Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpolda berupaya maksimal untuk mendukung terwujudnya Visi Bupati Manggarai 2021 -2026, yakni "Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing".**

2. Misi dan penjelasan makna tiap-tiap Misi

Adapun kontribusi dan partisipasi Badan Kesbangpolda dalam mewujudkan Visi Bupati Manggarai 2021 – 2026 tertuang dalam dokumen RPJMD 2021 -2026 pada Misi 1, "Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia" dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana table berikut.

<b>VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING</b>			
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial	Menurunnya potensi konflik sosial	Peningkatan pencegahan potensi konflik Sosial	Peningkatan Deteksi Dini Konflik Sosial
			Peningkatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan
			Peningkatan Peran Lembaga Adat
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Optimalnya pemberdayaan Ormas dan Orpol	Peningkatan pemberdayaan ormas dan orpol	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
			Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
			Peningkatan Pembinaan Organisasi Politik Masyarakat

*Sumber : Buku Renstra 2021 – 2026 Badan Kesbangpolda Matrisk dan Tabel 5.1 hal. 36*

3. Tujuan, Sasaran dan Program.

Tujuan, sasaran dan program tertuang dgalam Tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran	Program
Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	1. Menurunnya potensi konflik sosial	1.1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		1.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1.3 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	2. Optimalnya pemberdayaan Ormas dan Orpol	2.1 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		2.2 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Tabel Matriks Renstra

#### **B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan Tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam Tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ada pada Lampiran.

#### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati dalam PK

tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024 saja, tetapi termasuk kinerja yang telah dicapai melalui program dan kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dimaksud, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya potensi konflik sosial	a. Prosentase konflik yg diselesaikan	82%	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	262.950.000

		b. Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	262.950.000
2	Optimalnya pemberdayaan Ormas dan Orpol	c. Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS	
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
Sub Kegiatan : Penyus Bahan perumusan kebijakan di Bid Pend Pol, Etika Budaya Pol, Pening Demokrasi, Fasil Kelemb Pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pilkada serta pemantauan situasi politik di daerah.				39.347.488.073	
d. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan		100%	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelak bid ketahanan, ekonomi sosial dan budaya.	
				Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan penghayat kepercayaan di daerah.	74.820.000

Sumber : Renstra Tabel 5.1 dan 7.2 dan Matriks dan sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan TA.2024

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, hal ini menjadi ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja) Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan maka capaian dimaksud dibagi atas 5 (lima) kategori seperti berikut:

**TABEL 3.1**  
**KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

<b>NILAI CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PREDIKAT KINERJA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 2 sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 99,61% dengan kategori “baik”.

#### **B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran–sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 :** Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran (sebagaimana tergambar pada Tabel 2.2 diatas). Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran kinerja Tahun 2024 yang diperbandingkan dengan pengukuran kinerja Tahun 2018,2019, 2020, 2021,2022 dan Tahun 2023. Analisis capaian indikator untuk sasaran pertama dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	21	22	23
1	Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12	14	116,66	12	12	100	12	14	116,66	12	12	100	12	14	116,66	12	12	100	4	10	250
2	Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)	30	23	76,66	30	36	120	30	23	76,66	30	36	120	30	23	76,66	30	36	120	120	156	130
Rata-rata					96,66			110			115,84			96,66			110			190		
Kategori		ISTIMEWA																				

**Keterangan :**

T : Target

R : Realisasi

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran sejak Tahun 2018-2024 adalah 190% dengan kategori **Istimewa**. Secara prosentase (kuantitatif) capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian sejak Tahun 2018 sebesar 96,66% menjadi 190% pada Tahun 2024, secara kuantitatif juga tergambar dari penanganan kasus serta pelaksanaan pengamanan tertutup yang realisasinya melampaui target dengan kategori memuaskan, walaupun penanganan – penanganan kasus dimaksud belum secara utuh tuntas ddisesuaikan karena ada beberapa alasan. Indikator pada sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

**a. Kasus yang dimediasi penyelesaiannya.**

Capaian indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 190% dengan kategori memuaskan. Selama Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menangani kasus dengan jumlah 10 kasus dari target 4 kasus Tahun 2024. Adapun rincian laporan kegiatan mediasi penyelesaian masalah/ konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai seperti tertera pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3

LAPORAN KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH / KONFLIK SOSIAL OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KAB. MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DATA KASUS TAHUN 2024

NO	URAIAN KASUS	LOKASI	GAMBARAN RINGKAS KASUS & RINGKASAN PENYELESAIAN/PENANGANAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kasus Penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional Geothermal PLTPU - Ulumbu	Desa Wewo, Wae Ajang, Mocok, Ponggeok - Kec. Satar Mese	Telah dilakukan upaya penyelesaian antara Pihak PLN dengan Kelompok Masyarakat yg menolak yg difasilitasi oleh Pemerintah, sehingga beberapa kelompok yg Kontra telah menerima serta mendukung program tersebut, dan beberapa anggota masyarakat lainnya dalam proses fasilitasi.	Masih dalam proses fasilitasi lebih lanjut
2	Sengketa Tanah antara sekelompok warga pemilik lahan dengan PT Gistek di Cuncalega	Desa Pong Lengor - Kec. Rahong Utara	Beberapa pemilik lahan menolak pembebasan lahan utk Pembangunan serta perluasan jaringan PT Gistek karena tidak sesuai dengan perundingan awal, namun setelah difasilitasi dan dilakukan edukasi oleh pemerintah, telah menemukan kata sepakat yaitu nilai ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.	Selesai
3	Sengketa / Pro Kontra antara tua Adat atas tanah yang akan diserahkan kepada Gereja	Desa Satar Loung - Kec. Satar Mese	Bahwa beberapa tua adat belum mempunyai kesamaan kesepakatan atas lokasi serta luas lahan / tanah yang dipruntukan bagi rencana pembangunan gereja / stasi di Desa Satar Loung.	Selesai
4	Sengketa Tanah antara Anton Taruk Cs Versus Warga Benteng Ds Terong	Desa Terong – Kec. Satar Mese Barat	Saling klaim salah satu lokasi tanah yang berada di Wae Maras Desa Terong – Kec. Satar Mese Barat antara keua belah pihak	Masih dalam proses fasilitasi lebih lanjut
5	Sengketa Tanah SDI Lao antara Keturunan Pater Thomas Ebo vs Komunitas Adat Lao dan Lao Lanar	Kel Wali - Kec Langke Rembong.	Tua adat dan Tua Gendang Lao dan Lao Lanar berkeberatan terhadap keluarga Pater Thomas Ebo yang menempati lahan / areal lahan yang semestinya sudah menjadi milik pemerintah (sdh diserahkan kepada pemerintah) sementara pihak Pater Thomas Ebo mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan tidak menjadi bagian yang diserahkan kepada pemerintah.	Masih dalam proses fasilitasi lebih lanjut
6	Sengketa Tanah Di Wae Cepang antara Bpk Agus Bandung vs Frans Cacong cs	Desa Terong - Kec. Satar Mese Barat.	Sengketa areal tanah kosong sekitar 6HA, dimana pihak Agus Bandung mengklaim selaku keturunan Raja Todo yang mempunyai hak atas tanah dimaksud, sementara bapak Frans Cacong ( mantan kades/tua gendang nagka ) juga mengklaim bahwa tanah dimaksud milik gendang nagka	Masih dalam proses fasilitasi lebih lanjut

7	Penghadangan pengukuran Ruas Jalan di wilayah Gendang Rebak Desa Mocok	Desa Mocok - Kec Satar Mese.	Beberapa kelompok masyarakat yg mengklaim diri sebagai pemilik tanah di wilayah gendang rebak menolak rencana perluasan / pelebaran jalan yang ada (exciting) yang secara teknis kemudian ditangani oleh pihak PLN dalam urusan pengeboran PLTPU, sementara sekelompok masyarakat lain baik yang berdomisi di wilayah kampung rebak maupun yg berdomisili di dalam wilayah satar mese, Langke Rembong dan juga di Manggarai timur yang juga mengklaim tanah dimaksud (yang masuk dalam areal perluasan / pelebaran jalan) adalah milik mereka juga dan menyetujui untuk dilakukan pelebaran jalan.	Selesai
8	Sengketa tanah lokasi lapangan Bola Sepak dan Tanah Gereja antara Niko Husen cs Vs Viktor Ngamal Cs	Pong Pahar – DesaHilihintir – Kec. Satar Mese Barat	Viktor Ngamal mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tuanya dan diambil secara sepihak oleh Niko Husen Cs	Masih dalam proses penyelesaian
9	Penyalahgunaan Izin oleh LSM-LPMS (Lembaga Peduli Masy Sehat)	Desa Ladur - Kec Cibal	indikasi bahwa LSM melakukan praktek jual beli obat herbal kepada masyarakat dengan memberi jaminan bahwa telah mendapat rekomendasi / ijin yg dikeluarkan oleh Pemerintah, sementara obat yg telah dibeli oleh masyarakat selain mahal juga dinilai tidak membawa perubahan kesehatan bagi masyarakat. Pihak Pemerintah telah mengklarifikasi dengan pihak LSM dimaksud dan mereka mengklaim bahwa mereka tidak menjual obat tetapi tetap melaksanakan kegiatan sesuai ijin yang dibrikan yaitu edukasi kesehatan bagi masyarakat.	Masih dalam proses pemantauan
10	Penyalahgunaan Perizinan oleh LSM-LPKPK	Desa Bulan - Kec Ruteng	LSM - LPKPK terindikasi melaksanakan kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan ruang lingkup ijin yang diberikan, dimana LSM dimaksud melakukan investigasi / audit terhadap Kepala Desa Bulan atas penyelenggaraan / pengelolaan APBDes Tahun 2024, yang dinilai bukan menjadi hak dan kewenangan LSM. Pihak pemerintah telah memfasilitasi persoalan dimaksud namun kedua belah pihak masing-masing mempertahankan diri, sehingga disarankan untuk menempuh jalur hukum.	Selesai - ditangani oleh Kepolisian

**b. Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)**

Capaian indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 130% atau meningkat dari Tahun sebelumnya. Selama Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dengan jumlah 156 PAMTUP dari target 120 PAMTUP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.4

**Pengamanan Tertutup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Kabupaten Manggarai Tahun 2024**

NO	URAIAN	LOKASI
1	2	3
1	Pamtup pra kampanye Capres Ganjar Pranawo	Kec. Langke Rembong
2	Pamtup kampanye Capres Ganjar Pranawo	Stadion Golo Dukal – Kec. Langke Rembong
3	Pamtup pasca kampanye Ganjar Pranawo	Kec. Langke Rembong
4	Pamtup Demo Nakes	Kec. Langke Rembong
5	Pamtup Demo Guru	Kec. Langke Rembong
6	Pamtup Permintaan maaf Nakes	Kec. Langke Rembong
7	Pamtup Hari Raya Idul Fitri	Kec. Langke Rembong
8	Pamtup Hari Raya Kenaikan Isa Almasih	Paroki-Proki Dalam Wil Kec. Langke Rembong
9	Pamtup Hari Raya Wafatnya Isa Almasih	Paroki-Paroki Dalam Wil Kec. Langke Rembong
10	Pamtup Hari Raya Paska	Paroki – Paroki Dalam wil Kec. Langke Rembong
11	Pamtupb Hari Raya Nyepi	Kec. Langke Rembong
12	Pamtup Tahun Baru Cina ( Imlek)	Kec. Langke Rembong
13	Pamtup Hari Raya Waisak	Kec. Langke Rembong
14	Pamtup Peringatan Hari Buruh	Kec. Langke Rembong
15	Pamtup Hari Raya Idul Adha	Kec. Langke Rembong
16	Pamtup Hari Raya Izra Miraj	Kec. Langke Rembong
17	Pamtup Hari Raya Galungan	Kec. Langke Rembong
18	Pamtup Festival Golo Curu	Kec. Langke Rembong
19	Pamtup Festival Kopi Manggarai	Kec. Langke Rembong
20	Pamtup pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Langke Rembong	Kec. Langke Rembong
21	Pamtup Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kantor KPUD	Kec. Langke Rembong
22	Pamtup Pleno penetapan ADPRD II terpilih	Kec. Langke Rembong
23	Pamtup Plantikan ADPRD II Kabupaten Manggarai	Kec. Langke Rembong
24	Pamtup Mediasi sengketa Tanah SDI Lao Kelurahan Wali	Kel. Wali - Kec. Langke Rembong
25	Pamtup Mediasi sengketa Tanah Penjara Lama di Kelurahan Mbaumuku	Kel. Mbaumuku - Kec. Langke Rembong
26	Pamtup Eksekusi Tanah diseputaran Mbaru Wunut diKelurahan Bangka Nekang	Kel. Watu - Kec. Langke Rembong
27	Pamtup Ikrar Kampanye Damai oleh Ketiga Paslon di Mbaru Wunut	Kec. Langke Rembong
28	pamtup Debat Cabub dan Cawabub Kabupaten Manggarai	Kec. Langke Rembong
29	Pamtup Deklarasi Paket Heri-Fabi di Poka Kecamatan Wae Ri,i	Poka – Kec. Wae Rii
30	Pamtup Deklarasi Paket Maksi - Ronald di Karot Kecamatan Langke Rembong	Kel. Karot - Kec. Langke Rembong
31	Pamtup Deklarasi Paket Yohan-Thomas di Ka Sama Kecamatan Langke Rembong	Kel. Wali - Kec. Langke Rembong
32	Pamtup Hari Kemerdekaan RI yang ke 79 Tahun	Kec. Langke Rembong
33	Pamtup HARDIKNAS	Kec. Langke Rembong

34	Pamtup Hari Kebangkitan Nasional	Kec. Langke Rembong
35	Pamtup Perarakan Sakramen Mahakudus	Kec. Langke Rembong
36	Pamtup Perarakan Patung Bunda Maria	Kec. Langke Rembong
37	Pamtup Hari Kesaktian Pancasila	Kec. Langke Rembong
38	Pamtup Pendaftaran Paket Heri-Fabi di KPUD	Kec. Langke Rembong
39	Pamtup Pendaftaran Paket Maksi-Ronald di KPUD	Kec. Langke Rembong
40	Pamtup Pendaftaran Paket Yohan-Thomas di KPUD	Kec. Langke Rembong
41	Pamtup Demo LPPDM Ke Bawaslu	Kec. Langke Rembong
42	Pamtup Misa Ekologi di Keuskupan Ruteng	Kec. Langke Rembong
43	Pamtup Sidang atas nama paket Cabup Nomor Urut I ( Bapak Maksi Ngkeros ) di Pengadilan Negeri Ruteng	Kec. Langke Rembong
44	Pamtup Paskibraka di Stadion Golo Dukal	Kel. Bangke Leda - Kec. Langke Rembong
45	Pamtup Pengukuhan anggota Paskibraka di Kantor Bupati Manggarai	Kec. Langke Rembong
46	Pamtup Kampanye ANSI-JANE di Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai	Kec. Langke Rembong
47	Pamtup Kampanye MELKY-JHONI di Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai	Kec. Langke Rembong
48	Pamtup Kampaye Paket SIAGA di Stadion Golo Dukal Kecamatan Langke rembong Kabupaten Manggarai	Kel. Bangka Leda - Kec. Langke Rembong
49	Pamtup Sosialisasi UU Pilkada Oleh KPUD	Kec. Langke Rembong
50	Pamtup Sosialisasi terkait pelanggaran atau sengketa PILKADA oleh BAWASLU di Aula EFATA Ruteng	Kec. Langke Rembong
51	Pamtup Pentabisan Imam Baru di Tadong Kelurahan Tadong Kecamatan Langke Rembong	Kec. Langke Rembong
52	Pamtup Pentabisan Imam Baru di Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong	Kec. Langke Rembong
53	Pamtup Pentabisan Imam Baru di Cewonikit Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong	Kec. Langke Rembong
54	Pamtup Hari Raya NATAL 25 Desember 2024	Kec. Langke Rembong
55	Pamtup Misa Tutup Tahun 31 Desember Tahun 2024	Kec. Langke Rembong
56	Pamtup Mediasi Kelompok Pro dan Kontra Geotermal di Ruangan SEKDA Manggarai	Kec. Langke Rembong
57	Pamtup Mediasi Kelompok Masyarakat Desa Pong Lengor dengan PT.Gistek di Ruangan TAPEM	Kec. Langke Rembong
58	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan TENDA	Kec. Langke Rembong
59	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan POCO MAL	Kec. Langke Rembong
60	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan SATAR TACIK	Kec. Langke Rembong
61	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan TADONG	Kec. Langke Rembong
62	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan KAROT	Kec. Langke Rembong
63	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan PITAK	Kec. Langke Rembong
64	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan MBAUMUKU	Kec. Langke Rembong
65	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan WALI	Kec. Langke Rembong
66	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan COMPANG TUKE	Kec. Langke Rembong
67	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan	Kec. Langke Rembong

	BANGKA LEDA	
68	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan GOLODUKAL	Kec. Langke Rembong
69	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan PAU	Kec. Langke Rembong
70	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan WASO	Kec. Langke Rembong
71	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan ROWANG	Kec. Langke Rembong
72	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan CAREP	Kec. Langke Rembong
73	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan LACI CAREP	Kec. Langke Rembong
74	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan COMPANG CAREP	Kec. Langke Rembong
75	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan WATU	Kec. Langke Rembong
76	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan BANGKA NEKANG	Kec. Langke Rembong
77	Pamtup Kampaye Paket HERI-FABI di Kelurahan LAWIR	Kec. Langke Rembong
78	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan TENDA	Kec. Langke Rembong
79	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan POCOMAL	Kec. Langke Rembong
80	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan SATAR TACIK	Kec. Langke Rembong
81	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan TADONG	Kec. Langke Rembong
82	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan KAROT	Kec. Langke Rembong
83	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan PITAK	Kec. Langke Rembong
84	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan MBAUMUKU	Kec. Langke Rembong
85	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan WALI	Kec. Langke Rembong
86	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan COMPANG TUKE	Kec. Langke Rembong
87	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan BANGKA LEDA	Kec. Langke Rembong
88	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan PAU	Kec. Langke Rembong
89	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan WASO	Kec. Langke Rembong
90	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan ROWANG	Kec. Langke Rembong
91	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan CAREP	Kec. Langke Rembong
92	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan LACI CAREP	Kec. Langke Rembong
93	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan COMPANG CAREP	Kec. Langke Rembong
94	Pamtup Kampaye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan WATU	Kec. Langke Rembong

95	Pamtup Kampanye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan BANGKA NEKANG	Kec. Langke Rembong
96	Pamtup Kampanye Paket MAKSI-RONALD di Kelurahan LAWIR	Kec. Langke Rembong
97	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan TENDA	Kec. Langke Rembong
98	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan POCOMAL	Kec. Langke Rembong
99	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan SATAR TACIK	Kec. Langke Rembong
100	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan TADONG	Kec. Langke Rembong
101	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan KAROT	Kec. Langke Rembong
102	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan PITAK	Kec. Langke Rembong
103	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan MBAUMUKU	Kec. Langke Rembong
104	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan WALI	Kec. Langke Rembong
105	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan BANGKA LEDA	Kec. Langke Rembong
106	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan GOLO DUKAL	Kec. Langke Rembong
107	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan PAU	Kec. Langke Rembong
108	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan WASO	Kec. Langke Rembong
109	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan ROWANG	Kec. Langke Rembong
110	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan CAREP	Kec. Langke Rembong
111	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan LACI CAREO	Kec. Langke Rembong
112	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan COMPANG CAREP	Kec. Langke Rembong
113	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan WATU	Kec. Langke Rembong
114	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan BANGKA NEKANG	Kec. Langke Rembong
115	Pamtup Kampanye Paket YOHAN-THOMAS di Kelurahan LAWIR	Kec. Langke Rembong
116	Pamtup Mediasi Tanah di Kumba Kecamatan Langke Rembong	Kel.Mbaumuku - Kec. Langke Rembong
117	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Karot	Kec. Langke Rembong
118	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Tadong	Kec. Langke Rembong
119	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Satar Tacik	Kec. Langke Rembong
120	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Tenda	Kec. Langke Rembong
121	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Poco Mal	Kec. Langke Rembong
122	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Carep	Kec. Langke Rembong
123	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Compang Carep	Kec. Langke Rembong
124	Pamtup sosialisasi Pantarli KelurahanLaci Carep	Kec. Langke Rembong
125	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Lawir	Kec. Langke Rembong
126	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Wali	Kec. Langke Rembong

127	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Pitak	Kec. Langke Rembong
128	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Mbaumuku	Kec. Langke Rembong
129	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Compang Tuke	Kec. Langke Rembong
130	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Bangka Leda	Kec. Langke Rembong
131	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Golo Dukal	Kec. Langke Rembong
132	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Waso	Kec. Langke Rembong
133	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Rowang	Kec. Langke Rembong
134	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Watu	Kec. Langke Rembong
135	Pamtup sosialisasi Pantarli Kelurahan Bangka Nekang	Kec. Langke Rembong
136	Pamtup DIES NATALIS UNIKA St. PAULUS RUTENG	Kec. Langke Rembong
137	Pamtup Hari Pahlawan Nasional 10 November	Kec. Langke Rembong
138	Pamtup Pembukaan Congko Lokap Gendang Tenda	Kec. Langke Rembong
139	Pamtup Misa 1000 Lilin dlm Rangka Pilkada Damai	Kec. Langke Rembong
140	Pamtup Penutupan Congko Lokap Gendang Tenda	Kec. Langke Rembong
141	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Laci Carep	Kec. Langke Rembong
142	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Compang Carep	Kec. Langke Rembong
143	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Mbaumuk	Kec. Langke Rembong
144	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Pitak	Kec. Langke Rembong
145	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Wali	Kec. Langke Rembong
146	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Watu	Kec. Langke Rembong
147	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Bangka Nekang	Kec. Langke Rembong
148	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Waso	Kec. Langke Rembong
149	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Tenda	Kec. Langke Rembong
150	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Satar Tacik	Kec. Langke Rembong
151	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Pau	Kec. Langke Rembong
152	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kel. Golo Dukal	Kec. Langke Rembong
153	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Kec. Langke Rembong	Kec. Langke Rembong
154	Pamtup Pleno Rekapitulasi Suara Tk. Kabupaten	Kel. Golo Dukal - Kec. Langke Rembong
155	Pamtup Pleno Penetapan Perolehan Suara	Kel. Golo Dukal - Kec. Langke Rembong
156	Pamtup Pleno Pengumuman Bupati / Wakil terpilih	Kel. Golo Dukal - Kec. Langke Rembong

➤ Data Demonstrasi / aksi unjuk rasa Tahun 2024

Pada Tahun 2024 ada beberapa aksi demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Adapaun data Demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi pada Tahun 2024 dapat dijelaskan pada table 3.5 berikut.

Tabel 3.5

DATA DEMO/ AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN PAMTUP OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TA. 2024

NO	TANGGAL	PENANGANAN MASALAH DEMONSTRASI	KET.
1	Feb 2024	Demo Tenaga Kesehatan yang menuntut kenaikan gaji serta diangkat menjadi PPPK	Selesai
2	20 Sept	Demo Eksekusi Lahan oleh Pengadilan Negeri Ruteng pada Lahan yang disengketa antar sesama keturunan Raja Manggarai ( Raja Ngambut / Raja Belek ) – Kel.Watu / Sebelah Barat Rumah Wunut	Selesai
3	Nov 2024	Demo Pendukung Paket Bupati dan Wakil Bupati ( Maksi Ngkeros dan dr.Ronald Susilo) yang berkeberatan atas ditetapkannya Bapak Maksi Ngkeros ( Nomor Urut 1) sebagai tersangka pelanggaran Kampanye (Black Campange)	Selesai
4	Nov 2024	Demo dari Bapak Marsel Ahang selaku Ketua LSM – PPDM Manggarai yang menuntut Bawaslu untuk bekerja netral serta integritit dalam menangani kasus pilkada di Manggarai.	Selesai

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 1 dengan target anggaran Rp. 262.950.000,- dan realisasinya Rp. 262.885.000,- (99,98% ). Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 1 MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN DIALOG YANG KONSTRUKTIF ANTARA ANGGOTA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DEMI MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	10	4	250 %
Jumlah Pengamanan Tertutup	120	156	130 %
<b>Rata-Rata</b>			190 %
<b>Kategori</b>			<b>ISTIMEWA</b>

2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Adapun akuntabilitas sasaran I dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7

## AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Sasaran 1 :</b> <i>Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</i>	466.000.000	435.565.000	93,47
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
SUB KEGIATAN :			
1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	262.950.000	262.885.000	99,98
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	17.830.000	17.200.000	96,46
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	25.490.000	-	0
4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	159.730.000	156.730.000	98,12

**Sasaran 2** : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaranwarga Negara dalam berpartisipasi politik serta peningkatan kerukunan umat beragama maka dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 yang diperbandingkan pengukuran kinerja Tahun 20186 sampai dengan Tahun 2024. Analisis capaian kinerja indikator sasaran kedua dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

No	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	600 org	472 org	78,66%	600 org	150 org	25 %	600 org	0	0	600 org	20 org	3,33%	130 orang	130 orang	100 %	35 orang	35 orang	100 %
2.	Jumlah peserta sosialisasi politik, Undang-Undang Politik dan HAM.	250 org	200	80%	250 org	50 org	20 %	250 org	0	0	250 org	20 org	8%	35 orang	35 orang	100 %	35 orang	0 orang	0 %
Rata-rata				79,33%			22,5 %			0 %			5,65%			100 %			50 %
Rata – Rata keseluruhan / Kategori		<b>42,90 % ( KURANG )</b>																	

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 99,61 % pada Tahun 2024 dengan kategori **baik**. Hal ini sangat berbeda Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa factor utama yang sangat dominan yang pencapaian target yaitu bahwa pada Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan politik dalam negeri juga ikutannya menangani anggaran hibah pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan pesta demokrasi kepada KPU, Badan Pengawas Pemilu, Hibah Pengamanan kepada Kepolisian dan juga TNI, yang nilainya mencapai 95% dari semua total anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Manggarai, selain dukungan factor-faktor lainnya seperti *sumber daya aparatur*.

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indicator sasaran pada sasaran 2 dengan target anggaran **Rp. 238.350.000,-** dan realisasinya Rp. 229.710.000,- (97,95%). Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 2  
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRATIS (PILPRES, PILKADA, PILEG) DAN  
KESADARAN WARGA NEGARA DALAM BERPARTISIPASI POLITIK**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	85 Orang	3.700 Orang	0,022 %
Jumlah peserta sosialisasi politik/ penyuluhan, Undang-Undang Politik dan HAM	0 Orang	1.250 Orang	0,0 %
Rata-Rata			0,011%
<b>Kategori</b>			<b>KURANG</b>

**2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2**

Adapun akuntabilitas sasaran 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut ini :

**Tabel 3.10**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 2**

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Sasaran2 :</b> <i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaranwarga negara dalam berpartisipasi politik</i>	<b>39.448.538.873</b>	<b>42.380.000</b>	<b>56</b>
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	39.448.538.873	42.380.000	56
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	39.448.538.873	39.385.349.779	99,84

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Sub Kegiatan :			
1. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	76.075.800	42.380.000	56
2. Penyus Prog Kerja di Bid Pend Pol, Etika Budaya Pol, Pening Demokrasi, Fasil Kelemb Pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pilkada serta pemantauan situasi politik di daerah.	4.520.000	0	0
3. Penyus Bahan perumusan kebijakan di Bid Pend Pol, Etika Budaya Pol, Pening Demokrasi, Fasil Kelemb Pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pilkada serta pemantauan situasi politik di daerah.	39.347.488.073	39.337.469.779	99,97
4. Pelaksanaan kebijakan di Bid Pend Pol, Etika Budaya Pol, Pening Demokrasi, Fasil Kelemb Pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pilkada serta pemantauan situasi politik di daerah.	6.590.000	0	0
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.865.000	5.500.000	40

Dari Kedua sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Total capaian dari kedua indikator sasaran adalah **56%** dengan kategori **kurang**. Realisasi terkait program dan kegiatan ini dapat di lihat pada Tabel 3.11 di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**TOTAL HASIL PENGUKURAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	1.1.Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa	85 Orang	85 Orang	100 %
		1.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM	0 orang	0 orang	0 %
Rata-Rata					100 %
Kategori					Istimewa
<b>Total</b>					<b>90 %</b>
<b>Kategori</b>					<b>BAIK</b>

### C. REALISASI ANGGARAN

1. Target dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Target dan realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dapat dijelaskan seperti pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12

TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TA. 2023

Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja Operasi	42.061.454.765	41.895.397.166	99,61
Belanja Modal	-	-	0.0
<b>Total</b>	<b>42.061.454.765</b>	<b>41.895.397.166</b>	<b>99,61</b>

2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dapat dijelaskan seperti pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TA. 2024

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruksi antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	466.000.000	435.565.000	93,47
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	39.448.538.873	39.385.349.779	99,84
<b>Total</b>	<b>39.914.538.873</b>	<b>39.820.914.779</b>	<b>96.65</b>

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Adapun Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dapat dijelaskan seperti pada Tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14**  
**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TA. 2024**

Sasaran Strategis	% rata-rata capaian kinerja sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% realisasi anggaran	Ket.
Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	190%	466.000.000	435.565.000	93,47	Efisien
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	100 %	39.448.538.873	39.385.349.779	99,84	Efisien
<b>Rata-rata</b>	145 %	39.914.538.873	39.820.914.779	96,65	<b>Efisien</b>

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada Tabel tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran 145 % ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 96,65 %, menunjukkan adanya *efisiensi* penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* kegiatan dalam rangka realokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan, dana pilkada, gaji ASN dan PPPK serta belanja-belanja strategis lainnya. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan perubahan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja. Substansi Perubahan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan hanya mengenai perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran sedangkan target kinerja tetap mengikuti target yang termuat dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai 2021-2026.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai merupakan tindak lanjut atau respon terhadap Permenpan Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Dua sasaran tersebut adalah Sasaran 1 yakni “*meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa*” dan Sasaran 2 yakni “*meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik*”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran I Program Kegiatan Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 190% dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Program Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 100% dengan kategori “memuaskan”. Total rata-rata kedua sasaran tersebut adalah 90 % dengan kategori ‘Baik’.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruteng, 12 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Daerah Kabupaten Manggarai



**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**

Pembina Utama Muda

NIP. 196809032000121004